

BAB II

RENCANA TIONGKOK UNTUK MENJADI CYBER HEGEMON DAN ALIBABA GROUP SEBAGAI SALAH SATU AKTORNYA

2.1 RENCANA TIONGKOK UNTUK MENJADI CYBER HEGEMON

Melihat dari sudut pandang historis, niat Tiongkok untuk menjadi cyber hegemon secara tidak langsung telah masuk kedalam ide yang diinisiasi oleh Deng Xiaoping. Ide tersebut adalah *Four Modernization* yang terdiri dari ambisi Tiongkok untuk menjadi yang terdepan di bidang Agrikultur, Industri, Teknologi, dan Pertahanan. Penerapan ide *Four Modernization* ini menjadi semangat bagi Tiongkok untuk bisa bersaing di lingkup *global*. Di antara empat sektor tersebut, Terdapat dua sektor yang menjadi fokus Tiongkok untuk bisa mendominasi dunia *global*, yang pertama adalah industri dan yang kedua adalah IPTEK. Fokus ini menjadi *top rank* untuk mengejar ketertinggalanya dari negara-negara maju seperti AS dan negara-negara barat lainnya (Boas & Kalathil, 2010). Dua sektor tersebut terus dikejar hingga sampai saat ini, yang mana Tiongkok sekarang dipimpin oleh Xi Jinping.

Progres Tiongkok untuk mengejar ketertinggalan dan upayanya mendominasi dunia *global* terbukti dari mengguritanya aktivitas ekonomi industri internasional yang dilakukannya. Salah satunya adalah keberhasilan Tiongkok dalam membentuk brand “made in China” untuk mendominasi produk-produk seperti alat dapur, elektronik, alat kantor, mainan, furnitur dan lain sebagainya (Made in China, n.d.). Maka dari dua sektor tersebut,

kini IPTEK merupakan fokus yang harus digencarkan oleh Tiongkok, salah satu caranya adalah dengan melakukan ekspansi untuk mendominasi *Cyberspace* dan menjadi hegemon di dalamnya (Xinhua, 2018).

Melakukan ekspansi tentu membutuhkan sebuah niat dan rencana. Niat tersebut diperlihatkan dengan didirikannya sebuah *Central Leading Group for Cybersecurity and Informatization* (CLGCI) (tahun 2018 ditingkatkan menjadi *Central Commission for Cybersecurity and Informatization* (CCCI) oleh Xi Jinping . Badan ini dibentuk bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan implementasi yang dibentuk di bawah *Central Committee of the Communist Party of China* (CCCPC) untuk tujuan mengelola masalah terkait internet. Tersebut membawahi sebuah institusi pemerintah Tiongkok yang bernama *cyberspace Administration of China* (CAC). CAC berfungsi untuk mengawasi dan mengatur apa saja yang menjadi aktivitas di *cyberspace*. Terbentuknya CAC tersebut menghasilkan sebuah rencana atau "*Strategic Thinking on Building China into a Cyber Superpower*" dengan detail-detail yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai partai (Triolo, Creemers, Webster, Lu, & Sacks, 2018).

Rencana atau "*Strategic Thinking on Building China into a Cyber Superpower*" tersebut mempunyai tujuan sistematis untuk menjadikan Tiongkok sebagai cyber hegemon, diantaranya adalah pertama, dengan memperkuat perencanaan keseluruhan, koordinasi, dan melakukan *top-level design* yang diiringi dengan pembentukan pola strategi layaknya 'permainan catur' untuk keamanan cyber dan informatisasi. Kedua, memperkuat konstruksi dan manajemen konten online, dan membangun lingkaran yang

terpusat agar online dan offline bisa bersinergi. Ketiga, Membangun sistem jaminan keamanan siber, yang mana ditujukan untuk secara paksa melindungi keamanan dan kepentingan cyberspace nasional. Keempat, memberikan perhatian penuh akan pentingnya peran utama informatisasi, yang mana membuat Internet dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan dapat memberi pelayanan kepada masyarakat.

Kelima, mengambil Empat Prinsip dan Lima Proposisi sebagai panduan. ‘Empat Prinsip’ dan ‘Lima Proposisi’ sendiri merupakan ide Xi Jinping untuk pendekatan yang dilakukan di *Cyberspace*. ‘Empat Prinsip’ itu adalah untuk menghormati kedaulatan dunia maya; Menjaga perdamaian dan keamanan; Merangsang kerja sama terbuka; Membangun ketertiban. Sedangkan ‘Lima Proposisi’ ini tersusun bertujuan untuk Mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan *global*, dan merangsang interkoneksi dan interaktivitas; Membangun Platform bersama untuk interaksi budaya online, dan merangsang pertukaran dan pembelajaran bersama; Mempromosikan inovasi dan pengembangan dalam ekonomi online, dan merangsang pertumbuhan bersama; Menjamin keamanan siber dan merangsang pengembangan yang tertib; dan Membangun sistem tata kelola Internet, dan merangsang keadilan dan keadilan. dengan pendekatan tersebut, maka akan memperkuat suara dan pengaruh dari Tiongkok untuk dunia internasional. Keenam, Memperkuat kepemimpinan Partai dalam mengatasi isu *cybersecurity* dan informatisasi. Karena dengan memperkuatnya, maka pembangunan kekuatan nasional di cyberspace akan lebih terjamin (Kania, Sacks, Triolo, & Webster, Translation: “Deepening

the Implementation of General Secretary Xi Jinping's Strategic Thinking on Building China into a Cyber Superpower: Steadily Advancing Cybersecurity and Informatization Work", 2017).

2.2 LATAR BELAKANG TIONGKOK INGIN MENJADI CYBER

HEGEMON

Ada beberapa faktor yang mendorong Tiongkok untuk berniat mengembangkan pengaruhnya di cyberspace. Pertama, karakter pemimpin negara merupakan hal yang mempengaruhi setiap negara dalam mengambil keputusan dan penetapan kebijakan. Xi Jinping mempunyai karakter atau gaya yang otoriter. Hal tersebut diperlihatkan dengan diamandemnya konstitusi negara olehnya agar Xi Jinping bisa memerintah lebih dari dua periode (Doubek, 2018). Selain itu, Xi Jinping juga menjabat 10 posisi selain dari presiden, yaitu Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Ketua Komisi Militer Pusat, Pemimpin Kelompok Utama Pusat untuk Pertahanan Nasional dan Reformasi Militer Komisi Militer Pusat dan lain-lain (Chan, 2017). Karakteristik tersebut diperkuat juga dengan keinginannya untuk mempunyai citra sebagai 'ayah' bagi negara Tiongkok. beliau mengupayakan ini dengan cara menggunakan berbagai 'alat' pemerintahan dan berbagai media yang dimiliki untuk mengajarkan ideologi Tiongkok dan pemikirannya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri (The Economist, 2018).

Kedua, dilihat dari faktor internal Tiongkok sendiri. Tiongkok saat ini telah mengalami kemajuan ekonomi yang pesat, yang tidak lepas dari peran kebijakan reformasi dan keterbukaan terhadap sistem ekonomi dari

ide yang diinisiasi oleh Deng Xiaoping (University of Washington, 2001). Pasca reformasi ekonomi tersebut, Tiongkok saat ini telah melakukan lompatan ekonomi tiga puluh kali lipat. Kemajuan ini dibuktikan dengan besarnya GDP yang dimiliki Tiongkok pada tahun 2019, yaitu sebesar US\$14 Triliun. Dengan jumlah GDP tersebut, jika dilihat dari sudut pandang *purchasing power parity* (PPP) atau daya beli masyarakat, saat ini Tiongkok telah menjadi salah satu hegemon ekonomi dunia saat ini dengan jumlah sebesar US\$ 25 Triliun mengalahkan Amerika Serikat yang hanya mencapai US\$ 20 Triliun (Frindos, 2018). Dengan kebanggaan dan pencapaian ekonomi inilah, Tiongkok melihat dirinya perlu melakukan ekspansi hegemoninya ke sektor yang lain yaitu cyberspace.

Ketiga, Dilihat dari faktor eksternal, di era Milenium ini, Tiongkok menjadi penantang baru bagi Amerika Serikat. Tendensi ini muncul karena setidaknya terdapat dua perbedaan yang mengakibatkan persaingan, yang pertama adalah Ideologi yang dianut dua negara ini jelas berlawanan, antara Demokrasi yang dianut Amerika Serikat dan Komunisme yang dianut Tiongkok (McFaul, 2019). Kedua adalah Ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dialami Tiongkok yang begitu pesat. Perkembangan inilah yang membuat Amerika Serikat merasa terganggu akan kehadiran Tiongkok dan berupaya untuk menyingkirkan Tiongkok karena berpotensi mengancam hegemoninya di dunia internasional. Tendensi ini semakin menguat setelah Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Atas dasar inilah Donald Trump menyatakan perang dagang dengan Tiongkok, yang akhirnya keduanya memasang tarif yang tinggi untuk setiap barang-barang yang

masuk ke dalam negaranya (Shalal, 2019). Aksi Donald Trump memunculkan reaksi, Xi Jinping dengan latar belakang yang ambisius untuk menjadikan Tiongkok negara *superpower* serta menjadi lebih keras dalam melakukan upayanya. Di saat Amerika Serikat berambisi untuk merontokan ekonomi Tiongkok melalui perang dagang, Tiongkok saat ini justru sedang membangun kekuatan baru di sektor di mana Amerika Serikat menjadi dominan di dalamnya, yaitu sektor IPTEK (Webster, Laskai, Triolo, & Tai, 2018). *Cyberspace* merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi saat ini, dan di dalamnya terdapat peluang besar untuk membuat Tiongkok menjadi lebih besar dari apa yang telah dicapai saat ini. Peluang ini didukung dengan sumber daya yang dimiliki Tiongkok, yaitu jumlah penduduk yang pada tahun 2019 mencapai 1.4 Milyar dan pengguna internet dengan total 854 juta pengguna. Banyaknya sumber daya yang dimiliki Tiongkok serta sifat *cyberspace* yang *borderless*, memotivasi Tiongkok untuk dapat menguasai *cyberspace* tersebut (Lin, 2019).

Perang dagang yang sedang dilakukan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat mempengaruhi perusahaan-perusahaan multi-nasional milik masing-masing dari mereka. Salah satunya adalah Apple (Amerika Serikat) dan Huawei (Tiongkok). Dua raksasa teknologi ini terkena imbas dari perang dagang, di mulai dari Trump yang memberi sanksi *blacklist* ke pasar Amerika Serikat dengan alasan Huawei melakukan *cyber-espionage* menggunakan Platform mereka untuk kepentingan Tiongkok dan terus menekan Tiongkok dengan cara menarik lisensi OS Android (Google) di Platform smartphone Huawei. Pemblokiran pemakaian OS tersebut menuai

aksi balasan dari Tiongkok. Tiongkok mulai memblokir masuknya produk Apple ke dalam pasar besar yang dimiliki Tiongkok, ditambah dengan gerakan warga Tiongkok yang memboikot produk-produk Apple serta beralih ke Huawei (Stewart, 2019).

Melihat aksi balasan tersebut, Amerika Serikat dalam sudut pandang perdagangan telah kehilangan pasar besar yang dimiliki Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok justru melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan OSnya sendiri. Terbukti dengan langkah Huawei untuk menciptakan OS, pesaing baru bagi AndroidOS (Porter, 2019). Inovasi tersebut juga diikuti dengan langkah yang pada saat ini sedang mengembangkan teknologi 5G, yang mana membuat Amerika Serikat semakin tertantang dalam persaingan menjadi cyber hegemon (Dodwell, 2018). Manuver politik yang terkesan emosional dari Donald Trump ini justru bisa menjadi merugikan AS sendiri dan berpotensi untuk menambah daya kekuatan Tiongkok untuk mendistraksi Amerika Serikat di bidang pengembangan IPTEK dan masa depan cyberspace.

Berkaitan dengan faktor ekonomi, dengan media e-commerce lah, yang mana dapat menjadi salah satu sektor aktivitas perdagangan terjadi dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Dominasi sektor perdagangan di dunia cyber akan dengan signifikan mengangkat ekonomi Tiongkok (Khalil, 2018). Peningkatan tersebut disebabkan dengan tersentralisasinya aktivitas perdagangan global dalam satu Platform milik Tiongkok yang nantinya menjadi dominator, hal tersebut dapat menjadikan produk-produk Tiongkok sebagai prioritas. Perdagangan melalui e-commerce merupakan sesuatu

yang harus dikuasai oleh Tiongkok, karena dengan menguasai sektor tersebut akan memperkuat ekonomi Tiongkok (Shijia, 2019). Dukungan modal yang banyak akan mempermudah Tiongkok untuk melakukan penguasaan di sektor lain seperti *cybersecurity* dan pengembangan teknologi.

Upaya dominasi yang dilakukan Tiongkok pada akhirnya tidak jauh dalam konteks kepentingan politik (Ruan, 2018). Cyberberspace merupakan teritori di mana berbagai aktor negara bisa mendapatkan berbagai data dan informasi di dalamnya (Trip Wire, 2014). Data dan informasi merupakan hal penting bagi suatu negara karena dengannya, pemerintah dalam skala kebijakan lokal negaranya dapat membuat sebuah keputusan didalam sebuah hubungan baik itu bilateral maupun multilateral.

2.3 LANGKAH YANG TELAH DIAMBIL TIONGKOK

Tiongkok telah mengambil beberapa langkah untuk mencapai keinginannya, salah satunya adalah dibentuknya *Belt and Road Initiative* (BRI). Proyek BRI ini merupakan proyek ambisius untuk meraih hegemoni global dimulai dengan cara menghubungkan seluruh Eurasia untuk berbagai kepentingan seperti ekonomi, budaya, Pendidikan dan lain sebagainya, layaknya seperti jalur sutra kuno. Ambisi yang akan menghabiskan sekitar US\$ 1 Triliun – US\$ 8 Trilliun milik Tiongkok itu direalisasikan agar jalur tersebut berada di atas kendali Tiongkok. Proyek BRI ini di beberapa rute menggunakan rute jalur sutra kuno. Jalur sutra kuno tersebut dibangun kembali dengan sentuhan modern seperti Rel Kereta Api, Pelabuhan dan lain sebagainya (Hillman, 2018).

Proyek BRI ini ternyata bukanlah proyek dengan konstruksi fisik saja, namun BRI merupakan sebuah proyek yang akan diintegrasikan dengan dunia digital, atau bisa disebut *Digital Silk Road* atau *Information Silk Road*. Proyek *Digital Silk Road* pertama kali dicetuskan pada Tulisan yang berjudul “*Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road*” yang dirilis oleh *National Development and Reform Commission* (NDRC) pada tanggal 28 Maret 2015 (National Development and Reform Commission, 2015). *Digital Silk Road* dibentuk agar aktivitas di jalur sutera dunia nyata bisa lebih optimal. Optimalisasi ini dilakukan dengan dukungan pengolahan data dan informasi yang didapat dari cyberspace. Artinya untuk bisa mendominasi di berbagai lini, Tiongkok harus lebih cepat dari yang lain untuk membangun sistem integrasi anantara dunia nyata dan cyberspace tersebut.

Langkah BRI ini di perkuat dengan dibentuknya *Central Leading Group for Cybersecurity and Informatization* (CLGCI) pada tahun 2014 (pada tahun 2018 sudah menjadi *Central Commission for Cybersecurity and Informatization* (CCCI)) oleh partai. Komisi ini membawahi sebuah institusi pemerintah Tiongkok yaitu cyberspace *Administration of China* (CAC). CAC yang berisikan para pegawai pemerintahan Tiongkok membuat sebuah rancangan *Strategic Thinking* yang diberikan kepada Xi Jinping untuk dibacakan ketika berpidato di konferensi pertama dari CAC pada tahun 2014 silam. *Strategic Thinking* ini bertujuan untuk menjadikan Tiongkok sebagai cyber *superpower*. Dalam pidatonya tersebut, Xi Jinping telah membuat slogan *Wangluo Qiangguo* sebagai banner unifikasi dari

perjuangan Tiongkok untuk menjadi *Cyber superpower* (Creemers, et al., 2018).

Untuk menyempurnakan langkah yang diambil, Tiongkok memerlukan kontribusi dari berbagai aktor. Dalam tulisan kali ini, aktor yang akan dipilih Tiongkok adalah aktor non-negara atau perusahaan multi-konglomerat adalah Alibaba Group.

2.4 ALIBABA GROUP SEBAGAI SALAH SATU AKTORNYA

Alibaba Group (NYSE:BABA) merupakan perusahaan multi-konglomerat yang didirikan pada tahun 1999 oleh foundernya, Jack Ma dan bersama 17 rekan lainnya. Perusahaan ini mempunyai banyak cabang bisnis yang bergerak di sektor Internet, Retail, *E-commerce*, teknologi dan media. Di antara lima sektor tersebut, Alibaba Group unggul di sektor *e-commerce* (Kharpal, 2019).

Keunggulan *e-commerce* tersebut, menurut data dari Wall Street Journal sudah mengendalikan sekitar 80% dari semua penjualan ritel online di Tiongkok. Pada tahun 2014, Alibaba membuat sempat memecahkan rekor IPO tertinggi dengan nilai \$ 25 miliar. Sekarang menjadi salah satu dari 10 perusahaan paling berharga di dunia, perusahaan internet terbesar kelima di dunia, dan pada Januari 2018 menjadi perusahaan Asia kedua yang bernilai lebih dari US\$ 500 miliar (Eckstein, 2019). Pada tanggal 5 Mei 2019, kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh Alibaba Group telah mencapai US\$ 480 miliar (Forbes, 2019).

Menjadi perusahaan raksasa internet di era *globalisasi* dan *informatisasi* seperti sekarang, merupakan peluang Tiongkok untuk

menariknya sebagai ‘duta’ untuk mempromosikan dan memperluas kekuatan Tiongkok di cyberspace.

2.5 HUBUNGAN ALIBABA GROUP DENGAN PARTAI KOMUNIS TIONGKOK

Hal tersebut dibuktikan dengan berita tentang Partai yang membuat sebuah publikasi digital di website yang mengatakan bahwasanya Tiongkok berterima kasih atas kontribusi Jack Ma yang telah memberikan reformasi dan keterbukaan terhadap kemajuan di Tiongkok. pernyataan resmi yang dibuat oleh partai tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwasanya Jack Ma merupakan anggota partai (Reuters, 2018). Kejelasan informasi mengenai kapan Jack Ma resmi menjadi anggota partai sampai saat ini masih belum diketahui. Akibatnya, pertanyaan publik yang membanjiri mesin pencarian Baidu itu pun terjawab oleh salah satu teman kuliah Jack Ma Yun yang tidak ingin dipublikasikan namanya (Kharpal, Alibaba’s Jack Ma has been a Communist Party member since the 1980s, 2018). Dia menyebut bahwa Jack Ma telah bergabung menjadi anggota partai sejak kuliah di *Huangzhou Normal University*. Sekitar setahun kemudian, pada bulan September ini, Jack Ma sebagai CEO Alibaba Group resmi mengundurkan diri dari jabatannya (Li, 2019).

Jack Ma seolah-olah enggan disebut sebagai anggota dari partai dengan ketidakjelasan info tentang dirinya secara resmi sebagai anggota, namun dari partai dan teman semasa kuliah sendiri memberi bukti bahwa dirinya merupakan anggota partai. Alasan rasional dari Jack Ma atas kemisteriusan status keanggotaan partai diperkirakan untuk menjaga harga

saham (Chen, 2014). Menjaga kestabilan dari perusahaan akan mempertahankan upaya ekspansinya ke berbagai negara. Jack Ma sendiri berusaha menolak menjawab statusnya tersebut dan memilih untuk menjawab tidak, karena Jack Ma tidak ingin ada anggapan jika perusahaan yang secara terang-terangan terafiliasi dengan partai akan dikendalikan juga oleh partai dan pemerintahan Tiongkok (Murphy, 2018).

Analisis berdasarkan fakta tersebut diperkuat pasca kemunduran Jack Ma. Terdapat beberapa perubahan yang terjadi dalam masa kepemimpinan Daniel Zhang, CEO baru dari Alibaba Group (Soon, 2019). Salah satu yang menghebohkan adalah masuknya pegawai-pegawai resmi pemerintah ke dalam perusahaan 100 perusahaan terpilih, salah satunya Alibaba Group. Alasan pemerintah memasukan pegawai-pegawainya adalah untuk menjadi 'jembatan' antara pemerintah dan sektor swasta (Taylor, 2019). Entah apa yang menjadi tujuan dari masuknya pegawai pemerintahan tersebut, namun secara tidak langsung, cengkraman pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan swasta seperti Alibaba akan semakin kuat. Kuatnya cengkraman tersebut tidak bisa dinafikan nantinya akan mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam perusahaan.

2.6 ALASAN ALIBABA GROUP MENJADI SALAH SATU AKTOR DALAM RENCANA TIONGKOK

Bisa dikatakan, Alibaba Group merupakan perusahaan *private* yang sengaja dibiarkan tumbuh besar di sistem pemerintahan seperti Tiongkok agar bisa menguasai pasar cyberspace internasional. Seperti yang diketahui bersama, hampir seluruh negara di dunia ini berkiblat pada barat, atau bisa

dikatakan adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat yang pada tahun 1990 mengalahkan Uni Soviet pada perang dingin membuat dunia mengakui kehebatan Amerika Serikat dan mengikuti sistem politik dan pemerintahan yang diterapkannya. Konsep ekonomi dunia saat ini yang lebih cenderung kepada neoliberalis-kapitalis membuat Tiongkok harus membuat strategi baru agar bisa berkompetisi di dalam konsep ekonomi internasional saat ini (Harley, 2005). Salah satu caranya adalah dengan mendukung perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang teknologi internet seperti BAT (Baidu, Alibaba, dan Tencent) dan dalam pembahasan ini kita berfokus pada Alibaba Group untuk bisa melakukan penetrasi ke pasar internasional (Jing & Dai, 2017). Dukungan itu diwujudkan dengan membangun sebuah sistem internet yang bernama *Great Firewall*, sebuah sistem di mana pengguna internet Tiongkok tidak diizinkan untuk mengakses layanan internet yang telah diblokir oleh pemerintah Tiongkok seperti Facebook, Google, Twitter, dan Youtube (Wilford, 2017).

Dibangunnya *Great Firewall* ini menjadi kesempatan Tiongkok sendiri untuk membangun ekosistem pengganti layanan yang terpusat di AS tersebut. adanya kesempatan tersebut diambil oleh Alibaba Group untuk menyediakan berbagai layanan yang telah diblokir oleh pihak pemerintah, bagian yang diambil oleh Alibaba Group adalah Youku Tudou (pengganti Youtube), Weibo, (pengganti Twitter), dan AutoNavi (Navigation Map), UC Web (Search engine & Mobile Internet) (The Associated Press, 2014). Platform pengganti tersebut telah berkembang sangat cepat karena dukungan dari sistem *great firewall* yang diterapkan di Tiongkok. yang

menjadi Platform unggulan dari Alibaba adalah e-commerce yang dimiliki mereka, yaitu Taobao, Tmall, 1688, Alibaba.com, Aliexpress.com. Platform ini dapat unggul bukan karena penggunaanya yang banyak saja, namun memang Platform dari Alibaba ini telah menjadi bagian dari *Internet of Things* (IoT) di Tiongkok dan semakin membuat penggunaanya nyaman dengan layanan yang diberikan.

Dukungan pemerintah yang diberikan secara tidak langsung ini membuat Alibaba Group perlu mengucapkan “terima kasih” atas bantuan pemerintah Tiongkok tersebut, walaupun memang tidak secara resmi dilakukan. contohnya adalah dengan mengundang Alibaba sebagai anggota dari tiga raksasa teknologi dan internet tersebut (BATs) sebagai tim nasional untuk mengembangkan teknologi *Artificial Intelligent* (AI) dengan institusi pendidikan akademi DAMO (Jing & Dai, 2017). Tentu, pemerintah Tiongkok mempunyai visi ke depan akan dukunganya ke perusahaan Alibaba Group ini dengan menjadikanya aktor pendukung upaya Tiongkok untuk menjadi cyber hegemon dengan melakukan ekspansi ke berbagai negara dengan bekal pengalaman kesuksesan di dalam negerinya.

Dalam pemenuhan upaya Tiongkok untuk menjadi cyber superpower, berbagai upaya telah dilakukan oleh Alibaba Group, contohnya adalah dengan mengembangkan berbagai hal yang berkaitan dengan cyberspace dan digital seperti e-commerce, cloud service, big data, IoT, ET Brain Technology, akuisisi portal media, melakukan pendaftaran kerangka kepada WTO, dan kerjasama investasi dengan startup-startup di berbagai

negara. Upaya tersebut akan menjadi semakin terlihat jelas ketika dianalisis dengan menggunakan teori neo-Gramscianisme.

